

BAB III
URUSAN KONKUREN, FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN
DAERAH DAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

A. URUSAN KONKUREN

19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI

1. Organisasi Perangkat Daerah Pelaksana

SKPD yang melaksanakan urusan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

2. Program dan Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN
<i>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan</i>	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran	8.215.198.650	7.747.407.781,- (94.30%)	100 %
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	668.791.750,-	489.727.766,- (73.22 %)	100 %
	3. Peningkatan Disiplin Aparatur	535.160.000,-	516.040.000,- (96.43%)	100 %
	4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	76.275.000,-	46.766.600,- (61.31 %)	100 %
	5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan	21.365.000,-	20.782.000,- (97.27 %)	100 %
	6. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	35.800.000,-	22.829.400,- (63.77%)	100 %
<i>Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja</i>	7. Pembinaan Peningkatan Personil bagi Satuan Polisi Pamong Praja	95.406.000,-	89.035.000,- (93.32%)	100 %
	8. Pengiriman Peserta Bimtek dan Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur	48.000.000,-	16.608.000,- (34.60%)	100 %
	9. Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja	101.850.000,-	100.499.365,- (98.67%)	100 %
<i>Program Penegakan Perda dan Perkada</i>	10. Penindakan Yustisial terhadap Pelanggar Perda dna Perkada	44.484.000,-	0,- (0 %)	0 %
	11. Pembinaan dan Penindakan Non Yustisial terhadap Pelanggar Perda dan Perkada	40.505.000,-	23.620.000,- (58.31 %)	100 %
	12. Penatakelolaan Sekretariat PPNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	5.430.000,-	3.225.000,- (59.39 %)	100 %
	13. Bimtek Pemberkasan PPNS Penegak Perda Se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	22.706.000,-	17.479.000,- (76.98%)	100 %

	14. Rapat Koordinasi Satpol PP Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PPNS di Lingkungan Pemprov. Kep. Bangka Belitung	47.940.000,-	35.288.700,- (73.61 %)	100 %
<i>Program Peningkatan Ketertiban Umun dan Ketentraman Masyarakat</i>	15. Patroli	109.100.000,-	99.750.000,- (91.43 %)	100 %
	16. Gelar Pasukan dalam Rangka Peningkatan Penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas serta Kesiapsiagaan Tim Pemadam Kebakaran	113.745.500,-	26.400.000,- (23.21 %)	0 %
	17. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	1.098.250.000,-	1.021.724.000,- (93.03 %)	100 %
	18. Penyelenggaraan Deteksi Dini Pelanggaran Tibumtranmas	13.825.000,-	0,- (0 %)	0 %
<i>Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat</i>	19. Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	139.316.000,-	121.880.563,- (87.48 %)	100 %
	20. Bimtek Pengamanan Pemilu dan Pemilukada bagi Satlinmas Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	130.954.000,-	130.829.000,- (99.90 %)	100 %
	21. Pendidikan dan Pelatihan Bencana dan Kebakaran bagi Satlinmas	143.676.000,-	132.868.400,- (92.48 %)	100 %
	22. Pengurangan Resiko Bencana dan Kebakaran	19.780.000,-	990.000,- (5.00 %)	100 %

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

NO	KRITERIA	RINCIAN	JUMLAH PNS	JUMLAH CPNS	JUMLAH NON PNS	TOTAL
I	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	8	-	-	8
		Gol. III	38	-	-	38
		Gol.II	31	-	-	31
		Gol. I	-	-	-	-
		Tenaga Honorer	-	-	147	147
	Jumlah		77	-	147	224

II	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-	-
		S2	8	-	-	8
		S1	35	-	-	35
		D. IV	-	-	-	-
		D. III	-	-	-	-
		D. II	-	-	-	-
		D.I	-	-	-	-
		SMA / sederajat	34	-	-	34
		SLTP	-	-	-	-
	Jumlah		77	-	-	77
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural				
		- eselon II	1	-	-	1
		- eselon III	5	-	-	5
		- eselon IV	11	-	-	11
		Fungsional Tertentu	47	-	-	47
		Fungsional Umum	13	-	-	13

4. Alokasi dan Realisasi Anggaran

ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2019

NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

BELANJA TIDAK LANGSUNG		BELANJA LANGSUNG						TOTAL BELANJA (Rp)	REALISASI (Rp)	%
		BELANJA PEGAWAI		BELANJA BARANG DAN JASA		BELANJA MODAL				
ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)			
12.351.413.773,00	10.967.508.059,00	2.951.800.000,00	2.804.625.000,00	7.185.014.150,00	6.517.476.143,00	253.352.000,00	245.503.666,00	22.741.579.923,00	20.535.112.868,00	90.30 %

Jumlah Pegawai : 77 Orang/Desember 2019

5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Digunakan

PROSES PERENCANAAN	KONDISI SARANA DAN PRASARANA			KETERANGAN
	LENGKAP	KURANG	MENCUKUPI	
Dengan analisa permasalahan berdasarkan tupoksi dan dibahas dalam musrenbang.	-	√	-	

6. Permasalahan dan Solusi

a. Permasalahan

- a. Kurangnya pegawai Satpol PP yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa.
- b. Kurangnya SDM di bidang Administrasi Perkantoran dan Teknologi Informasi.
- c. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas.
- d. Belum adanya sarana teknologi informasi berbasis *online* yang mencukupi untuk pelaksanaan tugas yang berbasis komputerisasi.

b. Solusi

- a. Ujian Sertifikat Pengadaan barang dan Jasa tetap harus terus diikuti sehingga akhirnya akan didapat Pegawai yang Mempunyai Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa Sesuai dengan Perpres No. 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Sehingga SKPD Satuan Polisi Pamong Praja tidak tergantung dengan Petugas dari SKPD lain yang mempunyai Sertifikat Pengadaan Barang dan Jasa.
- b. Adanya penambahan formasi pegawai yang berkualitas di bidang Administrasi Perkantoran khususnya di bidang Komputer dan Teknologi Informasi.
- c. Mengupayakan ketersediaan anggaran untuk penambahan dan perbaikan sarana prasarana penunjang tugas pengamanan Satpol PP di lapangan.
- d. Mengupayakan sarana dan prasarana penunjang untuk sistem komputerisasi/teknologi informasi berbasis *online* yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka optimalisasi pelaporan dan transparansi informasi SKPD.

B. INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK)

1. Aspek Tataanan Pengambil Kebijakan (Lamp. I.1)

ASPEK	FOKUS	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Jenis Data (Tahun 2018)	Capaian Kinerja	Sumber Data	Langkah Pengisian
2	3	4	5	6	7	8	9	10
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DAERAH	Personil (Kebijakan ketersediaan alat tramtib)	3	Rasio personil SATPOL PP terhadap jumlah penduduk	Jumlah personil SATPOL PP pada akhir tahun 2019 dibagi jumlah penduduk kali 50.000.	Data jumlah personil Satpol PP = 333 orang Jumlah Penduduk = 1.400.497 jiwa	per 50.000 penduduk	Satpol PP	$\frac{333}{1.400.497} \times 50.000 = 11.89$

2. Aspek Tatanan Pelaksana Kebijakan (Lamp. I. 2)

LAMPIRAN I. 2:
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8 ASPEK) ADMINISTRASI UMUM
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN	Program Nasional (yang melekat di kementrian/ LPND) yang harus dilaksanakan oleh SKPD	1	Jumlah Program Nasional yg dilaksanakan oleh SKPD	Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%	- Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak 0 program. - Jumlah program nasional yang dilaksanakan SKPD, sebanyak 0 program	$\frac{0}{0} \times 100 \% = 100 \%$	Program Nasional (terlampir)
		Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq Kementerian/ LPNK	2	Keberadaan Standard Operating Procedure (SOP)	Jika ada	21 Standard Operational Procedure (SOP) Satpol PP Prov. Kep. Babel	21 Standard Operational Procedure (SOP) Satpol PP Prov. Kep. Babel, yaitu: 1. SOP Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat 2. SOP Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa 3. SOP Patroli 4. SOP Penjagaan Gedung dan Aset Penting 5. SOP Penjagaan Lokasi Kunjungan Kerja Pejabat Pemda 6. SOP Penjagaan Rumah Dinas Pejabat Pemda (Rumah Dinas Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah) 7. SOP Penjagaan Tempat Kedatangan dan Tujuan Tamu VVIP 8. SOP Pengawalan Pejabat dan Orang-orang	Standard Operational Procedure (SOP) Satpol PP Prov. Kep. Babel (Terlampir)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
							<p>Penting</p> <p>9. SOP Penjagaan Sekitar Ruang Kerja Pejabat Pemerintah Daerah</p> <p>10.SOP Penjagaan Tempat Upacara dan Acara Penting</p> <p>11.SOP Pelayanan Pengaduan</p> <p>12.SOP Penegakan Peraturan Daerah (Non Yustisial dan Yustisial)</p> <p>13.SOP Sosialisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</p> <p>14.SOP Pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara</p> <p>15.SOP Operasional dalam Penegakan Perda dan Perkada</p> <p>16.SOP Operasional dalam Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas PPNS</p> <p>17.SOP Pelatihan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran bagi Satlinmas</p> <p>18.SOP Pemantauan, Pelaporan Kejadian Bencana/Peristiwa Lainnya dan Pemetaan Daerah Rawan Kebakaran</p> <p>19.SOP Mobilisasi/Penugasan Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kab/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> <p>20.SOP Pembinaan dan Pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat Kab/Kota Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p> <p>21.SOP Peningkatan Kapasitas/Diklat/Sosialisasi/Bimtek Satuan Perlindungan Masyarakat Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
2	KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)	3	Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada terhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN	Jumlah PERDA pelaksanaan PERMEN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - PERDA pelaksanaan sebanyak 2 Perda - PERDA yang seharusnya, sebanyak 2 Perda 	$\frac{2}{2} \times 100\% = \mathbf{100\%}$	<ul style="list-style-type: none"> • Perda Prov. Kep. Bangka Belitung Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Terlampir) • Perda No. 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Terlampir)
3	PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH	Pengisian struktur jabatan	4	Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi	Jumlah jabatan yang ada (yang diisi) dibagi jumlah jabatan yang ada x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Jabatan yang ada sebanyak =17 jabatan - Jabatan yang harus ada, sebanyak =17 jabatan 	$\frac{17}{17} \times 100\% = \mathbf{100\%}$	DUK Satpol PP Prov. Kep. Bangka Belitung tahun 2019 (Terlampir)
			5	Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada atau tidak ada jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD	Ada, 2 Jabatan Fungsional Tertentu: 1) JFT Pranata Humas 2) JFT Pol PP		SK Jabatan Fungsional Tertentu Pranata Humas dan SK dan Jabatan Fungsional Pol PP (Terlampir)
4	PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH	Tingkat kompetensi SDM dalam	6	Rasio PNS Provinsi	Jumlah PNS SKPD terhadap Total PNS Provinsi	<ul style="list-style-type: none"> - PNS SKPD sebanyak 77 personil - Total PNS Provinsi, sebanyak 5.469 personil 	$\frac{77}{5.469} \times 100\% = \mathbf{1.408\%}$	DUK Satpol PP Prov. Kep. Bangka Belitung tahun 2019 (Terlampir)

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		menyelenggarakan tugas SKPD yang relevan dengan urusan terkait	7	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak 16 org. - Pejabat yang ada, sebanyak 17 org.	$\frac{16}{17} \times 100\% = \mathbf{94.12\%}$	DUK Satpol PP Prov. Kep. Bangka Belitung tahun 2019 (Terlampir)
			8	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan	Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPD yang ada x 100%	- Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak 17 org. - Jabatan yang ada, sebanyak 17 jabatan	$\frac{17}{17} \times 100\% = \mathbf{100\%}$	DUK Satpol PP Prov. Kep. Bangka Belitung tahun 2019 (Terlampir)
5	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD	9	Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada atau tidak ada dokumen perencanaan SKPD berikut jumlahnya	Dokumen yang ada tahun 2019, sebanyak 3 jenis, yg terdiri dari: -RENSTRA SKPD -RENJA SKPD -RKA-SKPD	Ada	<ul style="list-style-type: none"> • Renstra Satpol PP Prov. Kep. Bangka Belitung (Terlampir) • Renja Satpol PP Prov. Kep. Bangka Belitung (Terlampir) • RKA Satpol PP Prov. Kep. Bangka Belitung (Terlampir)
		Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD	10	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD	Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%	- Program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak 4 program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMD sebanyak 4 program	$\frac{4}{4} \times 100\% = \mathbf{100\%}$	Mengacu dokumen RKPD tahun 2019 dan Renja-SKPD ybs.
		Sinkronisasi program RKA SKPD dengan Program RENJA	11	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi	- Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam RKA SKPD,	$\frac{4}{4} \times 100\% = \mathbf{100\%}$	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2019 dan Renja-SKPD ybs.

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		SKPD			jumlah program dalam RKA SKPD x 100%	sebanyak 4 program.		
		Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran	12	Jumlah Program RENJA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD	Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD dibagi jumlah program dalam DPA SKPD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. - Program dalam DPA SKPD, sebanyak 4 program. 	$\frac{4}{4} \times 100\% = \mathbf{100\%}$	Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2019 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2019.
6	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Alokasi anggaran	13	Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD	Alokasi anggaran PD dibagi total APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Total Anggaran belanja PD, sebesar Rp 22.741.579.923,- - Total anggaran Belanja APBD, sebesar Rp 3.064.703.819.549,99 	$\frac{22.741.579.923}{3.064.703.819.549,99} \times 100\% = \mathbf{0.74\%}$	Mengacu APBD tahun 2019 terakhir.
		Realisasi belanja	14	Realisasi Belanja Perangkat Daerah terhadap total realisasi belanja APBD	Belanja belanja PD dibagi total realisasi belanja APBD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi Belanja PD, sebesar Rp20.535.112.868,- - Total Realisasi Belanja APBD, sebesar Rp2.774.918.295.522,58,- 	$\frac{20.535.112.868}{2.774.918.295.522,58} \times 100\% = \mathbf{0.74\%}$	
		Besaran belanja langsung dan tidak langsung	15	Total Belanja langsung dari total belanja perangkat daerah	total belanja langsung dari total belanja PD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi belanja langsung PD, sebesar Rp 9.567.604.809,- - Total realisasi belanja PD, sebesar Rp. 20.535.112.868,- 	$\frac{9.567.604.809}{20.535.112.868} \times 100\% = \mathbf{0.46\%}$	
			16	Total Belanja tidak langsung dari total belanja PD	total belanja tidak langsung dibagi total belanja PD x 100%	<ul style="list-style-type: none"> - Realisasi belanja tidak langsung PD, sebesar Rp 10.967.508.059,- - Total realisasi belanja PD, sebesar Rp 20.535.112.868,- 	$\frac{10.967.508.059}{20.535.112.868} \times 100\% = \mathbf{0.53\%}$	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Laporan keuangan SKPD	17	Keberadaan laporan keuangan SKPD (Neraca, Calk)	Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada (Neraca, Calk)	Apabila Ada, Laporan keuangan ada, sebanyak 5 jenis, sbb: - LRA - Neraca - LO - LPE - CaLK	Ada sebanyak 5 jenis : - LRA - Neraca - LO - LPE - CaLK	- LRA - Neraca - LO - LPE - CaLK (Terlampir)
7	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Manajemen asset SKPD	18	Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD	Ada atau tidak ada inventarisasi barang atau asset SKPD	Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. - Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi Data BMD Semester II per 31 Des 2019	Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi Data BMD Semester II per 31 Des 2019	Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi Data BMD Semester II per 31 Des 2019 (Terlampir)
		Penggunaan Asset SKPD	19	Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD	Jumlah asset yang tidak digunakan SKPD dibagi total asset yang dikuasai SKPD x 100 %	- Asset yang tidak digunakan, sebanyak Rp. 0,00 - Asset yang dikuasai SKPD, sebanyak Rp. 9.166.971.039,-	0 %	•BA Semua asset digunakan SKPD (Terlampir) •Rekapitulasi Hasil Rekonsiliasi Data BMD Semester II per 31 Des 2019 (Terlampir)
8	PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT	Bentuk-bentuk fasilitas / prasarana partisipasi masyarakat	20	Jumlah fasilitas / prasarana informasi : 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media	Jumlah fasilitas / prasarana partisipasi	Sebutkan jenisnya -Papan Pengumuman -Pos Pengaduan -Mobil Keliling	Jumlah sebanyak 3 jenis. -Papan Pengumuman -Pos Pengaduan -Mobil Keliling	

NO	ASPEK	FOKUS	NO	IKK	Rumus	Jenis Data	Capaian Kinerja	KETERANGAN
		Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat	21	Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik	Apabila Ada, sebutkan survey kepuasan tentang -----	Tidak ada	

LAMPIRAN I. 3:
TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN
ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN
DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2019

PROVINSI : KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NAMA SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
URUSAN YANG DILAKSANAKAN: PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

No.	ASPEK	No.	IKK	RUMUS/ PERHITUNGAN	Capaian Kinerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
5	Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat	51	Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah pengaduan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk}} \times 100\%$	$\frac{30}{30} \times 100\% = \mathbf{100\%}$	Satpol PP
		52	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	$\frac{\text{Jumlah Perda/Perkada yang memuat sanksi yang ditegakkan}}{\text{Jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang membuat sanksi}} \times 100\%$	$\frac{1}{1} \times 100\% = \mathbf{100\%}$	Satpol PP
		56	Persentase Personil Satpol PP berkualitas PPNS	$\frac{\text{Jumlah Personil Satpol PP Berkualitas PPNS}}{\text{Jumlah Personil Satpol PP}} \times 100\%$	$\frac{10}{77} \times 100\% = \mathbf{12.98\%}$	Satpol PP

BAB V TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

G. PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

1. Program dan Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN
<i>Program Peningkatan Pelayanan Pemerintahan</i>	1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
	2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	3. Peningkatan Disiplin Aparatur
	4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	5. Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan
	6. Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
<i>Program Pembinaan dan Pengembangan Personil Satuan Polisi Pamong Praja</i>	7. Pembinaan Peningkatan Personil bagi Satuan Polisi Pamong Praja
	8. Pengiriman Peserta Bimtek dan Diklat Peningkatan Kompetensi Aparatur
	9. Pembinaan Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja
<i>Program Penegakan Perda dan Perkada</i>	10. Penindakan Yustisial terhadap Pelanggar Perda dna Perkada
	11. Pembinaan dan Penindakan Non Yustisial terhadap Pelanggar Perda dan Perkada
	12. Penatakelolaan Sekretariat PPNS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	13. Bimtek Pemberkasan PPNS Penegak Perda Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	14. Rapat Koordinasi Satpol PP Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan PPNS di Lingkungan Pemprov. Kep. Bangka Belitung
<i>Program Peningkatan Ketertiban Umun dan Ketentraman Masyarakat</i>	15. Patroli
	16. Gelar Pasukan dalam Rangka Peningkatan Penyelenggaraan Tibumtranmas dan Linmas serta Kesiapsiagaan Tim Pemadam Kebakaran
	17. Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	18. Penyelenggaraan Deteksi Dini Pelanggaran Tibumtranmas
<i>Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat</i>	19. Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	20. Bimtek Pengamanan Pemilu dan Pemilukada bagi Satlinmas Se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
	21. Pendidikan dan Pelatihan Bencana dan Kebakaran bagi Satlinmas
	22. Pengurangan Resiko Bencana dan Kebakaran

2. Organisasi Perangkat Daerah yang Menangani

Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

3. Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan, Pangkat, dan Golongan

NO	KRITERIA	RINCIAN	JUMLAH PNS	JUMLAH CPNS	JUMLAH NON PNS	TOTAL
I	Berdasarkan Pangkat/ Gol	Gol. IV	8	-	-	8
		Gol. III	38	-	-	38
		Gol.II	31	-	-	31
		Gol. I	-	-	-	-
		Tenaga Honorer	-	-	147	147
	Jumlah		77	-	147	224
II	Berdasarkan Pendidikan	S3	-	-	-	-
		S2	8	-	-	8
		S1	35	-	-	35
		D. IV	-	-	-	-
		D. III	-	-	-	-
		D. II	-	-	-	-
		D.I	-	-	-	-
		SMA / sederajat	34	-	-	34
	Jumlah	SLTP	-	-	-	-
	Jumlah		77	-	-	77
III	Berdasarkan Jabatan	Struktural				
		- eselon II	1	-	-	1
		- eselon III	5	-	-	5
		- eselon IV	11	-	-	11
		Fungsional Tertentu	47	-	-	47
		Fungsional Umum	13	-	-	13

4. Sumber dan Jumlah Anggaran

Sumber dana adalah APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan jumlah anggaran sebesar Rp 22.741.579.923,00

5. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana belum memadai, diantaranya belum memiliki gudang untuk penyimpanan barang bukti sendiri serta sarana dan prasarana lain yang digunakan untuk menunjang tugas pengamanan di lapangan sangat terbatas.

6. Permasalahan dan Solusi

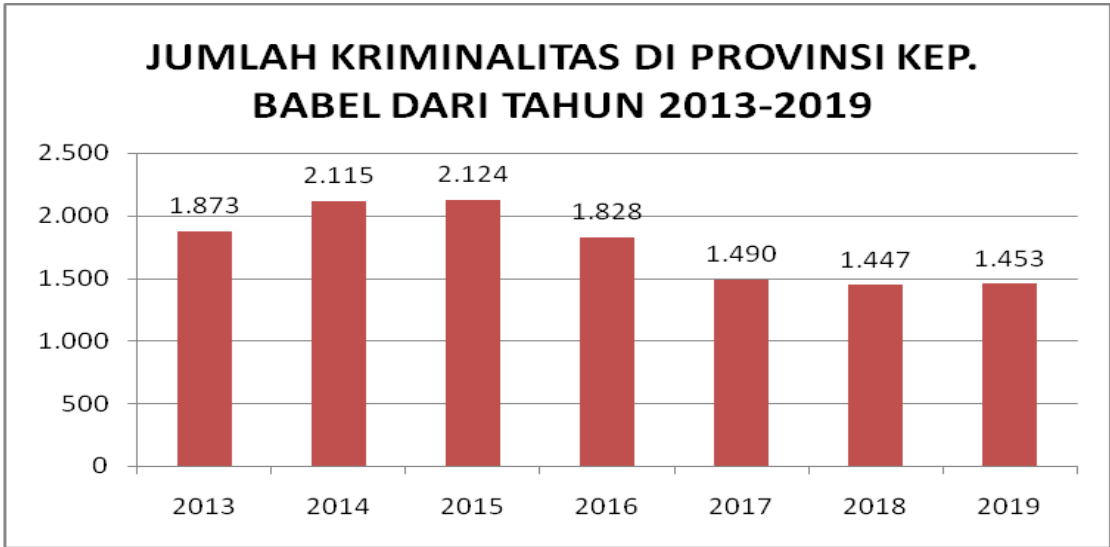
Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam kegiatan tidak ditemui permasalahan yang berarti.

BAB VI
PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN
PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN UMUM

A. GANGGUAN YANG TERJADI (KONFLIK BERBASIS SARA, ANARKISME, SEPARATISME, ATAU LAINNYA)

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencatat selama tahun 2019 tidak terjadi konflik berbasis SARA dan kegiatan separatisme di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Indikator keamanan menunjukkan jumlah kriminalitas konvensional di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 sebesar 1.453 kasus, namun demikian jika dilihat dari tahun 2013 sd 2019 trennya atau perkembangannya menurun.

Tabel 1
Jumlah Kriminalitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Dari Tahun 2013 – 2019



B. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENANGANI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, OPD yang melaksanakan ketentraman dan ketertiban umum tingkat provinsi adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. JUMLAH PEGAWAI, KUALIFIKASI PENDIDIKAN, PANGKAT DAN GOLONGAN

Secara umum jumlah pegawai PNS Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Desember 2019 sebanyak 77 orang, yang terdiri 73 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Jika dirinci berdasarkan pangkat dan golongan, seperti yang ditunjukkan pada tabel 2, pangkat golongan tertinggi adalah Pembina Utama Muda (IVc), dan terendah adalah Pengatur Muda Tk.I (IIb). Sementara itu pangkat dan golongan yang paling banyak adalah Penata Muda Tk.I (IIIb) sebanyak 17 orang, kemudian diikuti Pengatur Tk.I (IId) sebanyak 16 orang dan Pengatur Muda Tk.I (IIb) sebanyak 12 orang.

Adapun jumlah pegawai PNS Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per Desember 2019 yang bertugas di lapangan (selain Sekretariat) sebanyak 70 orang, seperti yang ditunjukkan pada tabel 3.

Berdasarkan eselonering, seperti yang ditunjukkan pada tabel 4, eselonering tertinggi adalah IIa yang diduduki oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, kemudian eselon IIIa yang merupakan jabatan Sekretaris dan Kepala Bidang yang berjumlah 5 (lima) orang, eselon IVa yang merupakan jabatan Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian, sebanyak 11 (sebelas) orang, 13 orang Jabatan Fungsional Umum (JFU), dan 47 orang Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).

Berdasarkan tingkat pendidikan, seperti yang ditunjukkan pada tabel 5, tingkat pendidikan tertinggi pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah pasca sarjana/S-2 sebanyak 7 orang, sedangkan terendah adalah tingkat pendidikan SLTA sebanyak 33 orang. Tingkat pendidikan yang paling banyak adalah Sarjana S1 sebanyak 35 orang.

Tabel 2
Jumlah Pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Pangkat Golongan, serta Jenis Kelamin Per Desember 2019

No.	Pangkat Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pembina Utama Muda/ IV c	1	-	1
2	Pembina Tk. I/ IV b	3	-	3
3	Pembina/ IV a	2	2	4
4	Penata Tk. I/ III d	10	1	11
5	Penata/ III c	9	-	9
6	Penata Muda Tk. I/ III b	17	-	17
7	Penata Muda/ III a	1	-	1
8	Pengatur Tk. I/ II d	16	-	16
9	Pengatur/ II c	2	-	2
10	Pengatur Muda Tk. I/ II b	12	1	13
11	Pengatur Muda/ II a	-	-	-
	Jumlah	73	4	77

Sumber: Subbag Kepegawaian Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 3
Pegawai PNS Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Per Desember 2019
Yang Bertugas Di Lapangan (Selain Sekretariat)

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	M. ARIS, SH NIP. 19630618 198603 1 007	Pembina Tk.I/IV b	Kabid Ketertiban Umum & Ketentraman Masyarakat
2	MALADI, SH.,M.Si NIP. 19630629 198503 1 007	Pembina Tk.I/IV b	Sekretaris Satpol PP
3	IBNU SUZANO, SE.,M.Ec.Dev NIP. 19740606 200212 1 005	Pembina Tk.I/IV b	Kabid Peningkatan Personil
4	YURINALIKA, S.H. NIP. 19680708 200212 2 001	Pembina/IV a	Kabid Perlindungan Masyarakat
5	SURYANTO, S.AP NIP. 19630103 198809 1 001	Pembina/IV a	Kabid Penegakan Perda dan Perkada
6	MUSTARIH NIP. 19631005 198503 1 009	Pembina/IV a	Kasi Pengembangan
7	NURMALA DEWI, SE.,MM NIP. 19780702 200604 2 009	Pembina/IV a	Kasubbag Umum
8	NOVIANSYAH, SE NIP. 19821117 200212 1 005	Penata Tk.I / III d	Kasubbag Keuangan
9	EDDY SUTARA, SE NIP. 19751229 200212 1 005	Penata Tk.I / III d	Kasi Deteksi Dini
10	TUGIMO, S.AP NIP. 19640808 198503 1 005	Penata Tk.I / III d	Kasi Pengawasan, Penyuluhan, dan Hubungan Antar Lembaga
11	EFFENDY, S.E., M.Ec.Dev NIP. 19811217 200212 1 001	Penata Tk.I / III d	Kasubbag Perencanaan

12	SURAYA, S.H. NIP. 19750910 200212 1 002	Penata Tk.I / III d	Kasi Pembinaan
13	R. SANDYAJI, S.STP.,M.AP NIP. 19851230 200412 1 001	Penata Tk.I / III d	Kasi Penertiban, Operasi dan Pengendalian
14	M. ANWAR, S.H. NIP. 19730219 200804 1 001	Penata Tk.I / III d	Kasi Pemeriksaan dan Penyidikan
15	ISDARTO, S.Sos NIP. 19710517 200604 1 008	Penata Tk.I / III d	Kasi Satuan Linmas
16	LIO NINDRA HANDIKA, S.H.,M.H NIP.19820211 200701 1 003	Penata/III c	Kasi Bina Potensi Masyarakat, dan Pemadam Kebakaran
17	FOREMAN JANUAR, SH.,M.H NIP.19730130 200212 1 002	Penata Tk.I / III d	Analisis Keamanan
18	YULIZAR, M.Pd NIP. 19760723 200604 1 012	Penata Tk.I / III d	Analisis Keamanan
19	RUSMIN NURYADIN, S.H. NIP.19710203 200604 1 006	Penata/III c	Polisi Pamong Praja Muda
20	ISMEI JUPANDI, S.AP NIP.19780521 200801 1 009	Penata/III c	Polisi Pamong Praja Muda
21	SUMARNO, S.AP NIP.19810814 200701 1 005	Penata/III c	Polisi Pamong Praja Muda
22	ACHMAD BENY SUMARMAN, S.AP NIP.19781124 200801 1 011	Penata/III c	Polisi Pamong Praja Muda
23	SAHRUL, S.AP NIP.19790816 200801 1 008	Penata/III c	Polisi Pamong Praja Muda
24	SARMADI, S.AP NIP.19740627 200604 1 011	Penata/III c	Polisi Pamong Praja Muda
25	JUNIARDI, S.AP NIP.19800602 200701 1 004	Penata/III c	Polisi Pamong Praja Muda
26	KUSUMA JAYA, S.H. NIP.19841011 200801 1 004	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Pertama
27	SAIPUL NIP. 19650920 198503 1 002	Penata Muda Tk.I / III b	Petugas Keamanan
28	DUMEIRYDIANSYAH, S.H. NIP.19770517 200701 1 006	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Pertama
29	FEMI ARDIANSYAH, S.AP NIP.19840214 200801 1 002	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Pertama
30	ZUHRI ARIFIYANTO PUTRA, S.IP NIP.19760312 200604 1 004	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Pertama
31	ISNANTO, S.AP NIP.19731228 200604 1 009	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Pertama
32	DODY CHANDRA, S.AP NIP.19810129 200801 1 005	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Pertama
33	DAVID CASIDY, S.AP NIP.19830426 200801 1 009	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Muda
34	MARYO SUPITRA, SH NIP. 19880513 201402 1 001	Penata Muda Tk.I / III b	Analisis Hukum
35	MAULID, S.AP NIP.19780719 200701 1 003	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Pertama
36	BIJI MUHAMMAD GUNTORO, S.H. NIP. 19881025 201502 1 004	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Muda
37	DEKKY JAYA SAPUTRA, S.H. NIP. 19890114 201502 1 002	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Muda
38	DARMAWI, S.AP NIP.19790312 200701 1 007	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Pertama
39	M. RIDWAN, S.H. NIP.19770411 200801 1 006	Penata Muda Tk.I / III b	Polisi Pamong Praja Pertama
40	SACHRIL, S.AP. NIP.19760721 200701 1 005	Penata Muda Tk.I / III b	Analisis Pengembangan SDM Aparatur
41	SULAIMAN NIP.19750208 200212 1 002	Penata Muda/III a	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
42	ADERI NIP.19780405 200212 1 005	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana

43	MAUREN NIP. 19681212 200604 1 013	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana
44	ACHYAR NIP.19710302 200604 1 010	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
45	RACHMAD SURYAWAN NIP.19710531 200604 1 005	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana
46	ARWIN JULIANDI NIP. 19710726 200604 1 003	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
47	YULIMAN ANDRE NIP.19740727 200604 1 010	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
48	ANDIKA NIP.19710926 200604 1 004	Pengatur Tk.I/II d	Petugas Keamanan
49	AGUS MULYANA NIP.19720819 200604 1 010	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
50	KARIMAN NIP.19670703 200701 1 009	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
51	NURUL IKHSAN NIP.19790407 200701 1 007	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
52	SUDHARMANTO NIP.19790624 200701 1 004	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana
53	WAHYU ANDARI NIP.19800707 200701 1 003	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana
54	ARIYANTO NIP.19810308 200701 1 002	Pengatur Tk.I/II d	Pengadministrasi Hukum
55	ERWIN DWIANTORO NUGROHO NIP. 19790225 200801 1 007	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana
56	MUSTAGHFIRI NIP.19790506 200801 1 012	Pengatur Tk.I/II d	Polisi Pamong Praja Pelaksana
57	HERMANTO NIP.19700511 200801 1 012	Pengatur/II c	Petugas Keamanan
58	M. HENDRI NIP.19751201 200801 1 011	Pengatur/II c	Polisi Pamong Praja Pelaksana
59	AFRIANTO NIP. 19650418 200701 1 005	Pengatur Muda Tk.I/II b	Petugas Keamanan
60	ATIN MUMPRAYITNO NIP. 19800216 201502 1 001	Pengatur Muda Tk.I/II b	Polisi Pamong Praja Pelaksana
61	ARISKA WIJAYANTO NIP. 19850417 201502 1 001	Pengatur Muda Tk.I/II b	Polisi Pamong Praja Pelaksana
62	JONI BUDI SANTOSA NIP. 19880617 201502 1 004	Pengatur Muda Tk.I/II b	Polisi Pamong Praja Pelaksana
63	HARIS SAPUTRA NIP. 19890919 201502 1 001	Pengatur Muda Tk.I/II b	Polisi Pamong Praja Pelaksana
64	RICARD OBERTWO NIP. 19901015 201502 1 001	Pengatur Muda Tk.I/II b	Polisi Pamong Praja Pelaksana
65	IRVIANDY PRATAMA NIP. 19910605 201502 1 001	Pengatur Muda Tk.I/II b	Polisi Pamong Praja Pelaksana
66	ZULPHAN MUGHNI BAKAR GANI NIP. 19911109 201502 1 001	Pengatur Muda Tk.I/II b	Polisi Pamong Praja Pelaksana
67	MUHAMMAD IRSAN BASKARA NIP. 19930928 201502 1 001	Pengatur Muda Tk.I/II b	Polisi Pamong Praja Pelaksana
68	BERRY YOLANDA NIP. 19940105 201502 1 002	Pengatur Muda Tk.I/II b	Polisi Pamong Praja Pelaksana
69	MUHAMMAD CACA RASKY NIP. 19940822 201502 1 001	Pengatur Muda Tk.I/II b	Polisi Pamong Praja Pelaksana
70	EKA FITRIA NINGSIH NIP. 19950830 201502 2 001	Pengatur Muda Tk.I/II b	Polisi Pamong Praja Pelaksana

Sumber: Subbag Kepegawaian Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 4
Jumlah Pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Eselonering dan Jenis Kelamin Per Desember 2019

No.	Pangkat Golongan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	II a	1	0	1
2	III a	4	1	5
3	IV a	10	1	11
4	Non Eselon	59	2	47
	Jumlah	73	4	77

Sumber: Subbag Kepegawaian Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Tabel 5
Jumlah Pegawai Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Menurut Tingkat Pendidikan Per Desember 2019

No.	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Pasca Sarjana/ S2	7	1	8
2	Sarjana/ S-1	33	2	35
3	Diploma-III	-	-	-
4	SLTA	33	1	34
	Jumlah	73	4	77

Sumber: Subbag Kepegawaian Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

D. SUMBER DAN JUMLAH ANGGARAN

Pada tahun 2019, anggaran Satpol PP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibiayai melalui APBD. Total anggaran APBD sebesar Rp 22.741.579.923,- yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp 12.351.413.773,- dan belanja langsung sebesar Rp 10.390.166.150,-.

E. PENANGGULANGAN DAN KENDALANYA

Salah satu tindakan penanggulangan yang dilakukan oleh anggota Satpol PP adalah dengan menggiatkan kegiatan patroli. Patroli merupakan kegiatan mengamati dan mengawasi terhadap suatu wilayah dengan tujuan menciptakan rasa tenteram dan kondisi yang tertib di masyarakat. Secara umum kendala yang dihadapi adalah minimnya jumlah personil anggota Satpol PP dan minimnya sarana patroli itu sendiri, karena cakupan wilayah patroli harus mencapai seluruh wilayah kecamatan dan desa di masing-masing daerah.

F. KEIKUTSERTAAN APARAT KEAMANAN DALAM PENANGGULANGAN

Keikutsertaan aparat keamanan terutama POLRI dalam rangka penanggulangan gangguan keamanan sangat diperlukan, terutama terhadap kejadian-kejadian yang menjurus anarkis. Selain pada saat kejadian, POLRI juga dapat meminimalkan kejadian gangguan keamanan dan ketertiban umum dengan juga melakukan patroli dan mengoptimalkan fungsi intelegennya serta penguasaan wilayah oleh anggota.